LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

**PERUBAHAN RENCANA KERJA**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Sebagai dokumen perencanaan jangka pendek Perangkat Daerah, dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan jangka pendek 1 (satu) tahun mengingat Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun. Fungsi Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Malang adalah memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam jangka satu tahun, serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Malang, yaitu “**Madep Manteb Manetep”**. Demikian maka Dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 yang disusun pada pertengahan Tahun 2019 adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target pencapaian dalam sisa Tahun Anggaran 2019.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 juga memuat hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.

Proses Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 diawali dengan adanya Surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor 050/2637/35.07.202/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, serta Surat Edaran Bupati Malang, tanggal 30 April 209, Nomor: 050/3517/35.07.202/2019, tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2019. Proses tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah kemudian Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyampaian rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun kepala Perangkat Daerah untuk kemuidan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang untuk memverifikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kembali kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 353 (1) Berdasarkan rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (7), rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan akhir Tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Pendapatan Daerah untuk dapat mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

* 1. **Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 12 Seri C);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);
26. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/986/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/584/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/212/KEP/35.07.013/2018 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.
    1. **Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun kedepan yaitu dalam Tahun Anggaran 2019.

Adapun tujuannya menjadi acuan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun rencana program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019**

* 1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019

**BAB III RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGAKAT DAERAH**

**BAB IV PENUTUP**

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN**

**TRIWULAN II TAHUN 2019**

* 1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah**

Evaluasi dilakukan guna melihat sejauh mana pencapaian pelakuan suatu kegiatan kemudian mengukur tingkat pencapaian dengan melihat kendala atau permasalahan yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dengan adanya peraturan tersebut Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Buapati Malang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Faktor-faktor penyebab terpenuhi dan tidak terpenuhi target kinerja program atau kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian dan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor–faktor penyebab, diuraikan pada **tabel 2.1** berikut ini:

| **TABEL 2.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2019** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No** | **Kode** | **Program/ Kegiatan** | **Indikator** | **Target Renstra PD pada** | | **Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018** | | **Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi** | |  | **Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi** | | **Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)** | | **Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019** | | **Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019** | | **KET.** |
| **Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)** | **Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)** | | **(Tahun 2019)** | |  | **(Tahun 2019)** | | **(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)** | | **(%)** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | |  | **9** | | **10 = 12/7x100** | | **11 = 6 + 12** | | **12=14/5 x100** | | **17** |
| **K** | **Rp** | **K** | **Rp** | **K** | **Rp** | **K** | **K** | **Rp** | **K** | **Rp** | **K** | **Rp** | **K** | **Rp** |
|  |  |  | |  | **126.744.134.199,00** |  | **40.524.273.613,00** |  | **32.550.387.400,00** |  |  | **10.787.279.517,00** | **53,15** | **33,14** |  | **51.311.553.130,00** | **291,12** | **40,48** |  |
| **1** | 4.402.29.01 | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)** | **100%** | **28.245.500.717,00** | **100%** | **11.977.582.475,00** | **100%** | **8.970.787.615,00** |  | **61%** | **4.087.955.006,00** | **61,00** | **45,57** | **61%** | **16.065.537.481,00** | **61,00** | **56,88** |  |
|  | 4.402.29.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | 39500 buah | 1.229.467.150,00 | 31000 buah | 449.085.000,00 | 8500 buah | 119.940.000,00 | 1721 buah | 4221 buah | 50.468.000,00 | 49,66 | 42,08 | 35221 buah | 499.553.000,00 | 89,17 | 40,63 | - |
|  | 4.402.29.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) | 60 bulan | 979.716.518,00 | 24 bulan | 390.364.900,00 | 12 bulan | 113.160.000,00 | 3 bulan | 6 bulan | 50.671.945,00 | 50,00 | 44,78 | 30 bulan | 441.036.845,00 | 50,00 | 45,02 | - |
|  | 4.402.29.01.03 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | 424 jenis | 2.898.980.112,00 | 168 jenis | 1.126.321.150,00 | 10 jenis | 325.992.800,00 | 4 jenis | 6 jenis | 161.176.200,00 | 60,00 | 49,44 | 174 jenis | 1.287.497.350,00 | 41,04 | 44,41 |  |
|  | 4.402.29.01.04 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | 53868 HOK | 1.244.739.891,00 | 11780 HOK | 453.271.900,00 | 12585 HOK | 210.097.500,00 | 1097 HOK | 2516 HOK | 39.275.000,00 | 19,99 | 18,69 | 14296 HOK | 492.546.900,00 | 26,54 | 39,57 | - |
|  | 4.402.29.01.05 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | 505 OB | 13.151.443.375,00 | 3930 OB | 6.313.972.000,00 | 7032 OB | 6.690.055.400,00 | 1668 OB | 4508 OB | 3.227.678.294,00 | 64,11 | 48,25 | 8438 OB | 9.541.650.294,00 | 1.670,89 | 72,55 |  |
|  | 4.402.29.01.06 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | 650 HOK | 1.436.930.705,00 | 930 HOK | 577.852.500,00 | 768 HOK | 250.220.000,00 | 57 HOK | 177 HOK | 95.135.000,00 | 23,05 | 38,02 | 1107 HOK | 672.987.500,00 | 170,31 | 46,84 |  |
|  | 4.402.29.01.07 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) | 224 jenis | 1.094.843.964,00 | 51 jenis | 369.830.000,00 | 13 jenis | 130.861.082,00 | 13 jenis | 13 jenis | 16.324.000,00 | 100,00 | 12,47 | 64 jenis | 386.154.000,00 | 28,57 | 35,27 |  |
|  | 4.402.29.01.08 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | 510 jenis | 3.574.242.662,00 | 188 jenis | 1.241.940.100,00 | 72 jenis | 400.077.000,00 | 9 jenis | 23 jenis | 200.038.500,00 | 31,94 | 50,00 | 211 jenis | 1.441.978.600,00 | 41,37 | 40,34 |  |
|  | 4.402.29.01.09 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | 525 HOK | 1.730.890.753,00 | 338 HOK | 547.121.925,00 | 633 HOK | 483.417.000,00 | 0 HOK | 260 HOK | 134.280.190,00 | 41,07 | 27,78 | 598 HOK | 681.402.115,00 | 113,90 | 39,37 |  |
|  | 4.402.29.01.10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | 70 jenis | 190.830.000,00 | 12 jenis | 238.600.000,00 | 2 jenis | 126.720.000,00 | 2 jenis | 2 jenis | 52.800.000,00 | 100,00 | 41,67 | 14 jenis | 291.400.000,00 | 20,00 | 152,70 |  |
|  | 4.402.29.01.11 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | 150 jenis | 713.415.587,00 | 82 jenis | 269.223.000,00 | 43 jenis | 120.246.833,00 | 8 jenis | 24 jenis | 60.107.877,00 | 55,81 | 49,99 | 106 jenis | 329.330.877,00 | 70,67 | 46,16 | - |
| **2** | 4.402.29.02 | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)** | **100%** | **20.699.873.792,00** | **100%** | **11.183.335.550,00** | **100%** | **1.866.957.223,00** |  | **35.43%** | **504.303.563,00** | **35,43** | **27,01** | **35.43%** | **11.687.639.113,00** | **35,43** | **56,46** |  |
|  | 4.402.29.02.01 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis) | 70 jenis | 2.102.372.846,00 | 24 jenis | 1.093.090.900,00 | 57 jenis | 298.286.434,00 | 4 jenis | 34 jenis | 143.077.963,00 | 59,65 | 47,97 | 58 jenis | 1.236.168.863,00 | 82,86 | 58,80 |  |
|  | 4.402.29.02.02 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | 320 unit | 2.443.407.600,00 | 237 unit | 753.326.550,00 | 309 unit | 450.722.197,00 | 34 unit | 102 unit | 194.124.800,00 | 33,01 | 43,07 | 339 unit | 947.451.350,00 | 105,94 | 38,78 |  |
|  | 4.402.29.02.03 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 636 jenis | 1.885.987.463,00 | 159 jenis | 851.774.000,00 | 47 jenis | 191.855.997,00 | 8 jenis | 31 jenis | 95.897.800,00 | 65,96 | 49,98 | 190 jenis | 947.671.800,00 | 29,87 | 50,25 |  |
|  | 4.402.29.02.04 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 100 jenis | 236.106.563,00 | 40 jenis | 97.215.000,00 | 15 jenis | 49.980.000,00 | 0 jenis | 4 jenis | 24.453.000,00 | 26,67 | 48,93 | 44 jenis | 121.668.000,00 | 44,00 | 51,53 |  |
|  | 4.402.29.02.05 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis) | 100 jenis | 4.773.837.620,00 | 34 jenis | 4.275.433.020,00 | 7 jenis | 141.185.000,00 | 0 jenis | 0 jenis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 jenis | 4.275.433.020,00 | 34,00 | 89,56 |  |
|  | 4.402.29.02.06 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit) | 57 unit | 3.747.314.000,00 | 59 unit | 3.054.290.000,00 | 10 unit | 391.396.530,00 | 0 unit | 0 unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 unit | 3.054.290.000,00 | 103,51 | 81,51 |  |
|  |  |  | Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit) | 0 Unit | 1.200.000.000,00 | 0 Unit | 0,00 | 0 Unit | 0,00 | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4.402.29.02.07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis) | 190 jenis | 4.310.847.700,00 | 46 jenis | 1.058.206.080,00 | 9 jenis | 343.531.065,00 | 0 jenis | 3 jenis | 46.750.000,00 | 33,33 | 13,61 | 49 jenis | 1.104.956.080,00 | 25,79 | 25,63 |  |
| **3** | 4.402.29.03 | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)** | **100%** | **2.237.897.975,00** | **20%** | **655.850.000,00** | **20%** | **439.627.440,00** |  | **0%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0%** | **655.850.000,00** | **0,00** | **29,31** |  |
|  | 4.402.29.03.01 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | 1670 stel | 1.478.897.975,00 | 1130 stel | 482.600.000,00 | 350 stel | 249.654.944,00 | 0 stel | 0 stel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1130 stel | 482.600.000,00 | 67,66 | 32,63 |  |
|  | 4.402.29.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) | 1340 stel | 759.000.000,00 | 525 stel | 173.250.000,00 | 350 stel | 189.972.496,00 | 0 stel | 0 stel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 stel | 173.250.000,00 | 39,18 | 22,83 |  |
| **4** | 4.402.29.04 | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | **Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)** | **100%** | **655.541.887,00** | **20%** | **209.193.850,00** | **20%** | **106.136.000,00** |  | **2.47%** | **3.865.000,00** | **12,35** | **3,64** | **2.47%** | **213.058.850,00** | **2,47** | **32,50** |  |
|  | 4.402.29.04.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang) | 40 orang | 655.541.887,00 | 207 orang | 209.193.850,00 | 224 orang | 106.136.000,00 | 2 orang | 4 orang | 3.865.000,00 | 1,79 | 3,64 | 211 orang | 213.058.850,00 | 527,50 | 32,50 |  |
| **5** | 4.402.29.05 | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | **Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)** | **100%** | **782.553.950,00** | **20%** | **216.599.400,00** | **20%** | **76.081.000,00** |  | **4.89%** | **3.699.000,00** | **24,45** | **4,86** | **4.89%** | **220.298.400,00** | **4,89** | **28,15** |  |
|  | 4.402.29.05.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Tahunan (Buku) | 488 buku | 157.820.200,00 | 158 buku | 111.352.000,00 | 75 buku | 23.976.000,00 | 0 buku | 10 buku | 3.699.000,00 | 13,33 | 15,43 | 168 buku | 115.051.000,00 | 34,43 | 72,90 | - |
|  | 4.402.29.05.02 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | 472 buku | 167.873.250,00 | 104 buku | 33.246.900,00 | 12 buku | 22.020.000,00 | 0 buku | 0 buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 buku | 33.246.900,00 | 22,03 | 19,80 |  |
|  | 4.402.29.05.03 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | 162 buku | 456.860.500,00 | 14 buku | 72.000.500,00 | 6 buku | 30.085.000,00 | 0 buku | 0 buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 buku | 72.000.500,00 | 8,64 | 15,76 |  |
| **6** | 4.402.29.06 | **PROGRAM PELAYANAN PENERIMAAN PAJAK BPHTB DAN BUMD** | **Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB** | **400%** | **8.921.748.000,00** | **100%** | **327.932.748,00** | **100%** | **3.112.319.305,00** |  | **47.05%** | **919.054.900,00** | **47,05** | **29,53** | **147.05%** | **1.246.987.648,00** | **36,76** | **13,98** |  |
|  | 4.402.29.06.01 | Pelayanan dan Penelitian BPHTB | persentase pengajuan permoohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani dan di teliti | 100% | 4.344.624.000,00 | 0% | 0,00 | 100% | 1.344.003.105,00 |  | 65% | 337.731.000,00 | 65,00 | 25,13 | 65% | 337.731.000,00 | 65,00 | 7,77 |  |
|  | 4.402.29.06.02 | Verifikasi dan Validasi | Persentase jumlah pengajuan permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB yang terferivikasi dan validasi | 90% | 3.423.632.000,00 | 0% | 0,00 | 80% | 1.280.390.200,00 |  | 61% | 458.929.100,00 | 76,25 | 35,84 | 61% | 458.929.100,00 | 67,78 | 13,40 |  |
|  | 4.402.29.06.03 | Pembukuan BPHTB dan BUMD | Jumlah laporan pembukuan BPHTB dan BUMD | 48 buku | 1.153.492.000,00 | 60 buku | 327.932.748,00 | 12 buku | 487.926.000,00 | 3 buku | 6 buku | 122.394.800,00 | 50,00 | 25,08 | 66 buku | 450.327.548,00 | 137,50 | 39,04 |  |
| **7** | 4.402.29.07 | **PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN** | **Tingkat Layanan PBB** | **400%** | **28.734.172.628,00** | **100%** | **6.070.234.400,00** | **100%** | **9.730.912.294,00** |  | **74.11%** | **2.649.131.925,00** | **74,11** | **27,22** | **174.11%** | **8.719.366.325,00** | **43,53** | **30,34** |  |
|  | 4.402.29.07.01 | Optimalisasi Penerimaan PBB P2 | Persentase Penerimaan PBB P2 | 400% | 13.066.936.000,00 | 100% | 2.733.930.350,00 | 100% | 2.845.645.669,00 |  | 20% | 1.699.944.875,00 | 20,00 | 59,74 | 120% | 4.433.875.225,00 | 30,00 | 33,93 | - |
|  | 4.402.29.07.02 | Pencetakan Massal dan Individual SPPT PBB P2 | Jumlah Penerbitan SPPT PBB P2 | 5505276 op | 4.256.424.000,00 | 1392226 op | 789.351.550,00 | 1391165 op | 1.314.838.826,00 | 1391165 op | 2782330 op | 224.614.650,00 | 200,00 | 17,08 | 4174556 op | 1.013.966.200,00 | 75,83 | 23,82 |  |
|  | 4.402.29.07.03 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB P2 | Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan PBB P2 dalam 1 tahun | 320 Desa | 2.628.340.628,00 | 390 Desa | 927.955.150,00 | 390 Desa | 949.798.971,00 | 390 Desa | 390 Desa | 234.441.200,00 | 100,00 | 24,68 | 390 Desa | 1.162.396.350,00 | 121,88 | 44,23 |  |
|  | 4.402.29.07.04 | Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2 | Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB P2 | 4 aplikasi SIM PBB | 1.267.512.000,00 | 1 aplikasi SIM PBB | 328.517.500,00 | 1 aplikasi SIM PBB | 1.085.338.431,00 | 0 aplikasi SIM PBB | 1 aplikasi SIM PBB | 55.233.150,00 | 100,00 | 5,09 | 2 aplikasi SIM PBB | 383.750.650,00 | 50,00 | 30,28 |  |
|  | 4.402.29.07.05 | Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB P2 | `- Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah SPPT PBB P2 yang didistribusikan | 5505276 op | 1.681.728.000,00 | 1515390 op | 342.541.850,00 | 1391165 op | 421.027.400,00 | 1043374 op | 2086748 op | 358.115.000,00 | 150,00 | 85,06 | 3602138 op | 700.656.850,00 | 65,43 | 41,66 |  |
|  | 4.402.29.07.06 | Pembentukan Dan Pemeliharaan Basis Data PBB P2 | `- Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan Basis data | 132 desa | 5.833.232.000,00 | 33 desa | 947.938.000,00 | 15 desa | 3.114.262.997,00 | 1 desa | 4 desa | 76.783.050,00 | 26,67 | 2,47 | 37 desa | 1.024.721.050,00 | 28,03 | 17,57 |  |
| **8** | 4.402.29.08 | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH** | **Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah** | **100%** | **16.152.969.250,00** | **100%** | **3.271.623.104,00** | **100%** | **4.095.399.100,00** |  | **52.38%** | **1.163.553.323,00** | **52,38** | **28,41** | **52.38%** | **4.435.176.427,00** | **52,38** | **27,46** |  |
|  | 4.402.29.08.01 | Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB | Jumlah Penagihan Pajak Daerah (Non PBB) yang di tagih | 10 sektor pajak | 4.459.960.000,00 | 10 sektor pajak | 684.815.300,00 | 9 sektor pajak | 994.831.100,00 | 9 sektor pajak | 9 sektor pajak | 344.775.750,00 | 100,00 | 34,66 | 9 sektor pajak | 1.029.591.050,00 | 90,00 | 23,09 |  |
|  | 4.402.29.08.02 | Penanganan Keberatan dan Pengurangan | jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak | 120 WP | 2.702.272.000,00 | 30 WP | 533.803.100,00 | 30 WP | 528.060.600,00 | 6 WP | 20 WP | 158.306.900,00 | 66,67 | 29,98 | 50 WP | 692.110.000,00 | 41,67 | 25,61 |  |
|  | 4.402.29.08.03 | Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah | Jumlah kegiatan Operasi Gabuangan yang di lakukan | 16 kegiatan | 2.839.346.750,00 | 14 kegiatan | 483.108.400,00 | 4 kegiatan | 684.614.000,00 | 1 kegiatan | 2 kegiatan | 93.594.652,00 | 50,00 | 13,67 | 16 kegiatan | 576.703.052,00 | 100,00 | 20,31 |  |
|  | 4.402.29.08.04 | Pemeriksaan Pajak Daerah | Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak | 16 kegiatan | 1.786.342.250,00 | 14 kegiatan | 540.286.040,00 | 4 kegiatan | 581.243.200,00 | 1 kegiatan | 3 kegiatan | 167.972.721,00 | 75,00 | 28,90 | 17 kegiatan | 708.258.761,00 | 106,25 | 39,65 |  |
|  | 4.402.29.08.05 | Rekonsiliasi Piutang Pajak | Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi Piutang dan Tunggakan Pajak di 7 UPT | 48 kegiatan | 2.015.846.000,00 | 12 kegiatan | 446.672.664,00 | 12 kegiatan | 424.161.500,00 | 2 kegiatan | 5 kegiatan | 148.955.500,00 | 41,67 | 35,12 | 17 kegiatan | 595.628.164,00 | 35,42 | 29,55 |  |
|  | 4.402.29.08.06 | Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah | Jumlah dokumen laporan hasil monitoring & evaluasi atas penerimaan pajak daerah | 19 dokumen | 2.349.202.250,00 | 19 dokumen | 582.937.600,00 | 12 dokumen | 882.488.700,00 | 3 dokumen | 6 dokumen | 249.947.800,00 | 50,00 | 28,32 | 6 dokumen | 832.885.400,00 | 31,58 | 35,45 |  |
| **9** | 4.402.29.09 | **PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK NON PBB DAN BPHTB** | **Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB** | **100%** | **20.313.876.000,00** | **100%** | **6.611.922.086,00** | **100%** | **4.152.167.423,00** |  | **57.90%** | **1.455.716.800,00** | **57,90** | **35,06** | **57.90%** | **8.067.638.886,00** | **57,90** | **39,71** |  |
|  | 4.402.29.09.01 | Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan | Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perpajakan | 19000 SKPD | 6.963.790.000,00 | 15000 SKPD | 3.589.807.100,00 | 15000 SKPD | 1.399.508.685,00 | 3000 SKPD | 6800 SKPD | 365.371.800,00 | 45,33 | 26,11 | 6800 SKPD | 3.955.178.900,00 | 35,79 | 56,80 |  |
|  | 4.402.29.09.02 | Penyusunan Data Penghitungan dan Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa | Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak dan Retribusi | 378 desa | 1.502.326.000,00 | 378 desa | 306.050.650,00 | 378 desa | 344.524.000,00 | 0 desa | 378 desa | 155.772.000,00 | 100,00 | 45,21 | 378 desa | 461.822.650,00 | 100,00 | 30,74 | - |
|  | 4.402.29.09.03 | Penyusunan Target dan Laporan Perpajakan | Jumlah Laporan Realisasi yang di susun | 864 laporan | 1.724.912.000,00 | 216 laporan | 371.397.936,00 | 216 laporan | 566.039.100,00 | 40 laporan | 140 laporan | 233.336.000,00 | 64,81 | 41,22 | 356 laporan | 604.733.936,00 | 41,20 | 35,06 |  |
|  | 4.402.29.09.04 | Pelayanan dan Pengadministrasian Permintaan Porforasi Benda - Benda berharga | Jumlah permintaan Perforasi dan Pengadministrasian pengelolaan Benda Benda Berharga | 1293 wajib pajak | 1.368.248.000,00 | 300 wajib pajak | 308.980.000,00 | 300 wajib pajak | 288.381.938,00 | 64 wajib pajak | 66 wajib pajak | 38.400.000,00 | 22,00 | 13,32 | 366 wajib pajak | 347.380.000,00 | 28,31 | 25,39 |  |
|  | 4.402.29.09.05 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah | jumlah obyek pajak yang di lakukan inten dan eksten | 118 OP | 4.227.200.000,00 | 102 OP | 1.034.335.400,00 | 18000 OP | 840.659.200,00 | 4953 OP | 9857 OP | 339.531.000,00 | 54,76 | 40,39 | 9857 OP | 1.373.866.400,00 | 8.353,39 | 32,50 |  |
|  | 4.402.29.09.06 | Pendaftaran Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak | Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak | 1293 WP | 4.527.400.000,00 | 300 WP | 1.001.351.000,00 | 300 WP | 713.054.500,00 | 275 WP | 313 WP | 323.306.000,00 | 104,33 | 45,34 | 613 WP | 1.324.657.000,00 | 47,41 | 29,26 |  |

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra sampai dengan tribulan II Tahun 2019 seperti yang ditampilkan pada tabel 2.1, diketahui bahwa perkiraan realisasi Capaian Target Renstra untuk semua Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang realisasi capaian program maupun tingkat capaian realisasi target Renstra Perangkat Daerah sudah terealisasi sesuai dengan target, hanya saja dikarenakan ada kesalahan penentuan target renstra pada awal tahun yang mengakibatkan capaian kinerja pada tribulan II Tahun 2019 ini menjadi sangat tinggi. Namun setelah di lakukan penyesuaian program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten yang memiliki 9 Program yaitu di antaranya 5 program rutin dan 4 program utama Badan Pendapatan, dengan total kegiatan 42 Kegiatan yang tercantum dalam Review Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018, Berikut ini program – program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang serta realisasi sampai dengan tribulan II Tahun 2019:

* + - 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 12 kegiatan. Realisasi kinerja sampai dengan bulan Juni tahun 2019 adalah sebesar 61,00%.
      2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 5 kegiatan.Realisasi sampai dengan bulan Juni tahun 2019 adalah sebesar 34,43%.
      3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan. Belum terlaksana realisasi sampai dengan tribulan II Tahun 2019 ini di rencanakan akan segera terealisasi setelah PAK.
      4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan. Realisasi kinerja sampai dengan bulan Juni tahun 2019 adalah sebesar 12,35%.
      5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 3 kegiatan.Realisasi sampai dengan bulan Juni tahun 2019 adalah sebesar 24,45%.
      6. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan, terdiri dari 6 kegiatan realisasi sebesar 74,11%.
      7. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB, terdiri dari 6 kegiatan.

Realisasi sampai dengan bulan Juli tahun 2018 adalah sebesar 57,90%.

* + - 1. Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah, terdiri dari 6 kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Juni tahun 2019 adalah sebesar 52,38%.
      2. Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD, terdiri dari 3 kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Juni tahun 2019 adalah sebesar 47,05%.

**BAB III**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 mengalami perubahan Pagu Anggaran yang sebmula sebesar Rp. 32.550.387.400,00 menjadi Rp. 33.300.387.400 dengan kenaikan angaran sebesar Rp. 750.000.000, penambahan pagu dana saat ini sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pagu anggaran yang diajukan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Malang. Dengan rincian sebagai berikut, dapat di lihat dalam table 3.1.

| **TABEL 3.1** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENCANA KERJA PENDANAAN RKPD PERUBAHAN TAHUN 2019** | | | | | | | | | | |
| **BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KODE** | **URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)** | **RANCANGAN AWAL RKPD** | | | **PROGRAM / KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)** | **HASIL ANALISIS KEBUTUHAN** | | **CATATAN PENTING** |
| **TARGET CAPAIAN KINERJA** | **KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF** | **SUMBER DANA** | **TARGET CAPAIAN KINERJA** | **KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **11** | **12** | **14** |
|  |  | | | **32.550.387.400,00** |  | | | | **33.300.387.400,00** |  |
| **4** | **FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **32.550.387.400,00** |  | | | | **33.300.387.400,00** |  |
| **4.402** | **KEUANGAN** | | | **32.550.387.400,00** |  | | | | **33.300.387.400,00** |  |
| **4.402.29** | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | | | **32.550.387.400,00** |  | | | | **33.300.387.400,00** |  |
| **4.402.29.01** | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)** | **100%** | **8.970.787.615,00** |  | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)** | **100%** | **9.577.881.783,00** |  |
| 4.402.29.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | 8500 buah | 119.940.000,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | 8500 buah | 251.550.000,00 |  |
| 4.402.29.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) | 12 bulan | 113.160.000,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) | 12 bulan | 302.400.000,00 | Pembayaran internet aplikasi pajak daerah yaitu SIPANJI dan SIMONI |
| 4.402.29.01.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | 10 jenis | 325.992.800,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | 82 jenis | 355.887.800,00 |  |
| 4.402.29.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | 7730 HOK | 210.097.500,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | 15470 HOK | 223.200.000,00 |  |
| 4.402.29.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | 287 OB | 6.690.055.400,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | 633 OB | 6.793.760.400,00 | Tambahan honor staf pengelola kegiatan yang belum dialokasikan |
| 4.402.29.01.19 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | 750 HOK | 250.220.000,00 | APBD Kabupaten | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | 750 HOK | 315.577.750,00 |  |
| 4.402.29.01.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) | 13 jenis | 130.861.082,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) | 13 jenis | 74.960.000,00 |  |
| 4.402.29.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | 72 jenis | 400.077.000,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | 72 jenis | 400.077.000,00 |  |
| 4.402.29.01.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | 633 HOK | 483.417.000,00 | APBD Kabupaten | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | 633 HOK | 513.502.000,00 | Alokasi perjalanan dinas ke luar negri dan luar provinsi |
| 4.402.29.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | 2 jenis | 126.720.000,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | 2 jenis | 226.720.000,00 | Jasa Pemberitaan Mass Media |
| 4.402.29.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | 43 jenis | 120.246.833,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | 43 jenis | 120.246.833,00 |  |
| **4.402.29.02** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)** | **100%** | **1.866.957.223,00** |  | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)** | **20%** | **1.795.650.117,00** |  |
| 4.402.29.02.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis) | 57 jenis | 298.286.434,00 | APBD Kabupaten | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis) | 57 jenis | 398.286.434,00 | Pemeliharaan Kntr Dinas dan UPT yang belum dianggarkan |
| 4.402.29.02.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | 309 unit | 450.722.197,00 | APBD Kabupaten | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | 309 unit | 450.722.197,00 |  |
| 4.402.29.02.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 47 jenis | 191.855.997,00 | APBD Kabupaten | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 47 jenis | 191.855.997,00 |  |
| 4.402.29.02.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 15 jenis | 49.980.000,00 | APBD Kabupaten | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 15 jenis | 49.980.000,00 |  |
| 4.402.29.02.09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis) | 7 jenis | 141.185.000,00 | APBD Kabupaten | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis) | 7 jenis | 198.619.424,00 |  |
| 4.402.29.02.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit) | 10 unit | 391.396.530,00 | APBD Kabupaten | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit) | 5 unit | 196.500.000,00 |  |
|  |  | Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit) | 0 Unit | 0,00 | APBD Kabupaten |  | Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit) | 0 Unit | 0,00 |  |
| 4.402.29.02.07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis) | 9 jenis | 343.531.065,00 | APBD Kabupaten | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis) | 8 jenis | 309.686.065,00 |  |
| **4.402.29.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)** | **20%** | **439.627.440,00** |  | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)** | **20%** | **249.654.944,00** |  |
| 4.402.29.03.05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | 350 stel | 249.654.944,00 | APBD Kabupaten | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | 350 stel | 249.654.944,00 |  |
| 4.402.29.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) | 350 stel | 189.972.496,00 | APBD Kabupaten | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) | 0 stel | 0,00 |  |
| **4.402.29.05** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | **Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)** | **20%** | **106.136.000,00** |  | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | **Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)** | **20%** | **158.136.000,00** |  |
| 4.402.29.05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang) | 224 orang | 106.136.000,00 | APBD Kabupaten | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang) | 224 orang | 158.136.000,00 |  |
| **4.402.29.06** | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | **Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)** | **20%** | **76.081.000,00** |  | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | **Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)** | **20%** | **76.081.000,00** |  |
| 4.402.29.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Tahunan (Buku) | 75 buku | 23.976.000,00 | APBD Kabupaten | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Tahunan (Buku) | 75 buku | 23.976.000,00 |  |
| 4.402.29.06.02 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | 12 buku | 22.020.000,00 | APBD Kabupaten | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | 12 buku | 22.020.000,00 |  |
| 4.402.29.06.04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | 6 buku | 30.085.000,00 | APBD Kabupaten | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | 6 buku | 30.085.000,00 |  |
| **4.402.29.07** | **PROGRAM PELAYANAN PENERIMAAN PAJAK BPHTB DAN BUMD** | **Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB** | **100%** | **3.112.319.305,00** |  | **PROGRAM PELAYANAN PENERIMAAN PAJAK BPHTB DAN BUMD** | **Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB** | **100%** | **2.938.696.360,00** |  |
| 4.402.29.07.01 | Pelayanan dan Penelitian BPHTB | persentase pengajuan permoohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani dan di teliti | 100% | 1.344.003.105,00 | APBD Kabupaten | Pelayanan dan Penelitian BPHTB | persentase pengajuan permoohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani dan di teliti | 100% | 1.225.100.910,00 |  |
| 4.402.29.07.03 | Verifikasi dan Validasi | Persentase jumlah pengajuan permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB yang terferivikasi dan validasi | 80% | 1.280.390.200,00 | APBD Kabupaten | Verifikasi dan Validasi | Persentase jumlah pengajuan permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB yang terferivikasi dan validasi | 100% | 1.206.671.200,00 |  |
| 4.402.29.07.08 | Pembukuan BPHTB dan BUMD | Jumlah laporan pembukuan BPHTB dan BUMD | 12 buku | 487.926.000,00 | APBD Kabupaten | Pembukuan BPHTB dan BUMD | Jumlah laporan pembukuan BPHTB dan BUMD | 12 buku | 506.924.250,00 |  |
| **4.402.29.08** | **PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN** | **Tingkat Layanan PBB** | **100%** | **9.730.912.294,00** |  | **PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN** | **Tingkat Layanan PBB** | **100%** | **9.730.912.294,00** |  |
| 4.402.29.08.01 | Optimalisasi Penerimaan PBB P2 | Persentase Penerimaan PBB P2 | 100% | 2.845.645.669,00 | APBD Kabupaten | Optimalisasi Penerimaan PBB P2 | Persentase Penerimaan PBB P2 | 100% | 2.813.835.669,00 |  |
| 4.402.29.08.05 | Pencetakan Massal dan Individual SPPT PBB P2 | Jumlah Penerbitan SPPT PBB P2 | 1376319 op | 1.314.838.826,00 | APBD Kabupaten | Pencetakan Massal dan Individual SPPT PBB P2 | Jumlah Penerbitan SPPT PBB P2 | 1391165 op | 1.199.328.926,00 |  |
| 4.402.29.08.06 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB P2 | Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan PBB P2 dalam 1 tahun | 320 Desa | 949.798.971,00 | APBD Kabupaten | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB P2 | Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan PBB P2 dalam 1 tahun | 390 Desa | 1.245.988.971,00 | Bimtek pengelolaan PBB-P2, anggaran diambil dari kegiatan lain dalam 1 program |
| 4.402.29.08.08 | Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2 | Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB P2 | 1 aplikasi SIM PBB | 1.085.338.431,00 | APBD Kabupaten | Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2 | Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB P2 | 1 aplikasi SIM PBB | 903.658.431,00 |  |
| 4.402.29.08.09 | Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB P2 | `- Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah SPPT PBB P2 yang didistribusikan | 1376319 op | 421.027.400,00 | APBD Kabupaten | Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB P2 | `- Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah SPPT PBB P2 yang didistribusikan | 1391165 op | 371.530.400,00 |  |
| 4.402.29.08.11 | Pembentukan Dan Pemeliharaan Basis Data PBB P2 | `- Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan Basis data | 33 desa | 3.114.262.997,00 | APBD Kabupaten | Pembentukan Dan Pemeliharaan Basis Data PBB P2 | `- Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan Basis data | 15 desa | 3.196.569.897,00 |  |
| **4.402.29.09** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH** | **Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah** | **100%** | **4.095.399.100,00** |  | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH** | **Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah** | **100%** | **4.095.399.100,00** |  |
| 4.402.29.09.01 | Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB | Jumlah Penagihan Pajak Daerah (Non PBB) yang di tagih | 10 sektor pajak | 994.831.100,00 | APBD Kabupaten | Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB | Jumlah Penagihan Pajak Daerah (Non PBB) yang di tagih | 9 sektor pajak | 880.548.700,00 |  |
| 4.402.29.09.05 | Pembinaan Aparatur Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah pembinaan aparatur pengelolaan Pajak di 7 UPT dan Konsultasi di provinsi dan pusat | 0 0 | 0,00 | APBD Kabupaten | Pembinaan Aparatur Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah pembinaan aparatur pengelolaan Pajak di 7 UPT dan Konsultasi di provinsi dan pusat | 0 0 | 0,00 |  |
| 4.402.29.09.07 | Penanganan Keberatan dan Pengurangan | jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak | 30 WP | 528.060.600,00 | APBD Kabupaten | Penanganan Keberatan dan Pengurangan | jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak | 30 WP | 647.050.200,00 | Untuk mengoptimalkan penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak |
| 4.402.29.09.08 | Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah | Jumlah kegiatan Operasi Gabuangan yang di lakukan | 4 kegiatan | 684.614.000,00 | APBD Kabupaten | Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah | Jumlah kegiatan Operasi Gabuangan yang di lakukan | 4 kegiatan | 699.290.000,00 |  |
| 4.402.29.09.06 | Pemeriksaan Pajak Daerah | Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak | 4 kegiatan | 581.243.200,00 | APBD Kabupaten | Pemeriksaan Pajak Daerah | Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak | 4 kegiatan | 532.225.800,00 |  |
| 4.402.29.09.09 | Rekonsiliasi Piutang Pajak | Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi Piutang dan Tunggakan Pajak di 7 UPT | 12 kegiatan | 424.161.500,00 | APBD Kabupaten | Rekonsiliasi Piutang Pajak | Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi Piutang dan Tunggakan Pajak di 7 UPT | 12 kegiatan | 639.168.100,00 | Tambahan untuk kegiatan rekonsialiasi yang belum dianggarkan, anggaran diambil dari kegiatan lain |
| 4.402.29.09.03 | Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah | Jumlah dokumen laporan hasil monitoring & evaluasi atas penerimaan pajak daerah | 19 dokumen | 882.488.700,00 | APBD Kabupaten | Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah | Jumlah dokumen laporan hasil monitoring & evaluasi atas penerimaan pajak daerah | 12 dokumen | 697.116.300,00 | Pengalihan anggaran ke kegiatan rekonsiliasi tunggakan pajak |
| **4.402.29.11** | **PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK NON PBB DAN BPHTB** | **Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB** | **100%** | **4.152.167.423,00** |  | **PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK NON PBB DAN BPHTB** | **Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB** | **100%** | **4.677.975.802,00** |  |
| 4.402.29.11.01 | Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan | Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perpajakan | 15000 SKPD | 1.399.508.685,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan | Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perpajakan | 15000 SKPD | 1.415.883.235,00 | -Tenaga ahli pengembangan aplikasi (pajak daerah) yaitu SIPANJI dan SIMONI ke sistem android dan IOS |
| 4.402.29.11.05 | Penyusunan Data Penghitungan dan Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa | Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak dan Retribusi | 378 desa | 344.524.000,00 | APBD Kabupaten | Penyusunan Data Penghitungan dan Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa | Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak dan Retribusi | 378 desa | 388.906.300,00 | Pelaksanaan rekonsiliasi pajak daerah dan retribusi daerah |
| 4.402.29.11.15 | Penyusunan Target dan Laporan Perpajakan | Jumlah Laporan Realisasi yang di susun | 216 laporan | 566.039.100,00 | APBD Kabupaten | Penyusunan Target dan Laporan Perpajakan | Jumlah Laporan Realisasi yang di susun | 216 laporan | 584.139.100,00 |  |
| 4.402.29.11.17 | Pelayanan dan Pengadministrasian Permintaan Porforasi Benda - Benda berharga | Jumlah permintaan Perforasi dan Pengadministrasian pengelolaan Benda Benda Berharga | 300 wajib pajak | 288.381.938,00 | APBD Kabupaten | Pelayanan dan Pengadministrasian Permintaan Porforasi Benda - Benda berharga | Jumlah permintaan Perforasi dan Pengadministrasian pengelolaan Benda Benda Berharga | 300 wajib pajak | 369.025.467,00 | -Jasa narasumber/instruktur/pelatih bimtek aplikasi |
| 4.402.29.11.18 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah | jumlah obyek pajak yang di lakukan inten dan eksten | 102 OP | 840.659.200,00 | APBD Kabupaten | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah | jumlah obyek pajak yang di lakukan inten dan eksten | 18000 OP | 982.359.200,00 | -Jasa narasumber/instruktur/pelatih bimtek aplikasi |
| 4.402.29.11.04 | Pendaftaran Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak | Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak | 300 WP | 713.054.500,00 | APBD Kabupaten | Pendaftaran Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak | Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak | 300 WP | 937.662.500,00 | -Tenaga ahli pengembangan aplikasi (pajak daerah) yaitu SIPANJI dan SIMONI ke sistem android dan IOS, -Jasa narasumber/instruktur/pelatih bimtek aplikasi, dan -Sosialisasi/pelatihan aplikasi dimaksud kepada aparatur pajak di Badan dan UPT. |
| 4.402.29.11.19 | Penyusunan Regulasi Perpajakan | Jumlah raperda dan perbub yang di hasilkan | 0 dokumen | 0,00 | APBD Kabupaten | Penyusunan Regulasi Perpajakan | Jumlah raperda dan perbub yang di hasilkan | 0 dokumen | 0,00 |  |

**BAB IV**

**PENUTUP**

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 ini, diharapkan pengelolaan pendapatan dalam rangka mendukung Pembangunan Daerah dapat berjalan dengan baik, dan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang.

Selanjutnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 ini, agar dapat terealisasi secara optimal dan mencapai sasaran di sisa Tahun Anggaran 2019.

Demikian untuk dilaksanakan.

**BUPATI MALANG,**

**SANUSI**